

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional Negara Republik Indonesia adalah perbaikan kualitas hidup masyarakat Indonesia di berbagai aspek bidang. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa di dalam proses pembangunan tersebut dibutuhkan adanya keterlibatan masyarakat, laki-laki dan perempuan secara serasi dan seimbang atau dibutuhkan adanya emansipasi dalam bidang kesempatan kerja.¹ Secara teoritik pemerintah telah berupaya meningkatkan status dan kedudukan perempuan dalam semua aspek pembangunan, akan tetapi beberapa pembangunan ditingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota masih belum menempatkan pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender.

Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.²

¹ Nurhayati, “*Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Upaya Peningkatan Kesetaraan Gender*”, Jurnal Tria Politika, Volume. 2, Nomor 2. Oktober 2018, hlm.18

² Dr. Mansour Fakih, “*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*”, Pustaka Pelajar: Yogyakarta , 1996, hlm. 8.

‘Perempuan’ adalah tema yang nyaris tidak punya tempat dalam historiografi Indonesia pascakolonial. Narasi historis Indonesia lebih sering berlangsung di seputaran laki-laki. Jikapun ada yang menghadirkan perempuan dalam proses sejarah, maka keberadaan mereka hanya dikaitkan pada beberapa aspek tertentu yang cenderung berkonotasi negatif, seperti pelacuran, kekerasan dan lain sebagainya.³

Pergeseran peran perempuan dari peran domestik ke publik merupakan tanda penting dari perkembangan realitas sosial, ekonomi, dan politik perempuan. Kesadaran perempuan tentu semakin meningkat terhadap peran nondomestik, namun keterlibatan itu bukan berarti hak perempuan semakin diperhatikan karena keterlibatan perempuan dimanfaatkan oleh laki-laki dan oleh berbagai kepentingan lain. perempuan telah menjadi faktor penting dalam ekonomi rumah tangga. Terutama pada saat laki-laki kehilangan kesempatan terlibat akibat segmentasi pasar tenaga kerja.⁴

Buruknya pemerintahan pada masa Orde Baru membuat wanita yang sering terdiskriminasi menciptakan perubahan. Perempuan-perempuan kemudian membentuk organisasi-organisasi yang diharapkan dapat membantu mewujudkan hak-hak mereka. Karena mereka juga menginginkan pergantian bentuk pemerintahan yang lebih demokratis yang mana salah satunya dengan melindungi hak-hak manusia. Meskipun demikian, hasilnya kurang maksimal karena masih adanya kontrol dari rezim Soeharto. Peranan perempuan dalam pembangunan selalu menjadi bagian dari

³Selfi Mahat Putri, “*Perempuan dan Modernitas: Perubahan Adat Perkawinan Minangkabau Pada Awal Abad ke-20*”, Gre Publishing: Yogyakarta, 2018, hlm.2.

⁴Dr. Irwan Abdullah, “*Sangkan Paran Gender*”, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2006, hlm. 22.

Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pemerintah. Dalam laporan Pelita (Pembangunan Lima Tahun) IV yang meliputi masa 1984-1989 dinyatakan bahwa kaum perempuan punya hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki, tidak berarti bahwa ini mengurangi peran mereka sebagai pencipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.⁵ Dalam proses pembangunan masyarakat sudah seharusnya mengembangkan setiap daya yang ada melalui upaya-upaya pemberdayaan, salah satunya adalah mengoptimalkan potensi kaum perempuan menjadi sebuah energi khususnya dalam proses kebijakan publik.

Pergerakan perempuan adalah suatu pergerakan yang bertujuan untuk menaikkan derajat (kedudukan) kaum wanita dalam masyarakat, disebut juga sebagai pergerakan emansipasi yang bertujuan untuk mencapai persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan terutama yang menyangkut urusan keluarga dan perkawinan. Sehingga wanita tidak hanya sebagai koki rumah tangga saja, tetapi juga sebagai pendidik anak-anaknya.⁶

Pergerakan perempuan di Indonesia hanya memiliki sedikit peluang untuk berkembang pada masa pendudukan Jepang (1942-1945). Satu-satunya organisasi yang di izinkan berjalan adalah Fujinkai (dalam bahasa Indonesia berarti perkumpulan perempuan), perkumpulan perempuan ini ditunjukan untuk memerangi buta huruf, menjalankan dapur umum dan ikut serta dalam pekerjaan sosial. Mereka

⁵ Julia Suryakusuma, *"Ibuisme Negara , Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru"*, Komunitas Bambu: Jakarta, 2011, hlm.18.

⁶ Adistia Restuana Widiyaning. "Peranan PKK dan Pengaruhnya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Perempuan di Kota Semarang Tahun 1972- 1998", Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm.5.

juga sangat berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka bersatu dalam jumlah besar yaitu para pasukan perempuan. Kaum perempuan mengorganisir diri membentuk tim perawat dan penghubung, menjalankan dapur umum, dan klinik berjalan.⁷

Perkumpulan perempuan yang populer pada masa pejuang ini adalah Persatuan Wanita Negara Indonesia (PERWANI). Kaum perempuan Indonesia melangkah memasuki periode demi periode dari masa kolonial sampai masa orde baru. Dalam bentuk gerakan perempuan, mereka turut berjuang. Terjadi arus balik gerakan perempuan di Indonesia tatkala Gerakan wanita Indonesia (Gerwani) dihancurkan pada akhir tahun 1965. Setelah itu organisasi-organisasi perempuan Indonesia masuk ke dalam orde baru dan menjadi organisasi fungsional.⁸

Untuk mengentaskan kemiskinan perlu adanya program yang mengarahkan masyarakat agar sejahtera untuk merevitalisasi program tersebut. Pemerintah mengelompokkan organisasi yang didominasi oleh kaum perempuan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam program yang memberdayakan serta dalam upaya kesejahteraan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat maka terwujud program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Organisasi ini yang mewadahi perempuan yang tidak berada di bawah departemen, serta organisasi

⁷ Cora Vreede-De Stuers, "*Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan dan Pencapaian*", Komunitas Bambu: Jakarta, 2008, hlm.175.

⁸ Adistia Restuana Widiyaning, Op. Cit. hlm.6.

ini bermula dari pendidikan kesejahteraan keluarga yang merupakan program pendidikan perempuan.⁹

Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK, hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan dalam mendukung program-program pemerintah. Dengan demikian kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tujuan setiap warga negara di mana saja berada dan suatu wilayah unit terkecil dalam negara yaitu kelurahan dan pemberdayaan ini dimulai dari kelurahan di terapkan program-program yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat yaitu PKK.¹⁰

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dibentuk dalam seminar tentang ilmu kesejahteraan rumah tangga di Bogor, Jawa Barat, pada 1957. Seminar ini diselenggarakan Bagian Pendidikan dan Lembaga Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan. Antara 1960 dan 1962, panitia antar departemen yang terdiri atas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perburuhan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah tokoh perempuan menyusun daftar topik pendidikan yang mereka anggap tepat untuk masyarakat yang sedang membangun¹¹.

Kemudian gerakan PKK dikembangkan atau diprakarsai oleh Ny. Isriati Moenadi, istri gubernur Jawa Tengah pada akhir tahun 1960-an, melihat penduduk

⁹ Muhammad Anshar. *“Analisis Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi warga di Kelurahan Sei Kera Hilir II Medan”*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2013.

¹⁰ *Ibid.* hlm.2.

¹¹ Julia Suryakusuma, *Loc. Cit*

Wonosobo dan Demak menderita kelaparan dan tingkat kesehatan mereka sangat rendah. Situasi ini diperburuk lagi dengan banyaknya pengangguran karena lahan mereka tandus dan tidak produktif. Hal ini, membuat Ny. Isriati terhentak hatinya, dan kemudian beliau mencetuskan Gerakan yang usahanya membuat keluarga sejahtera dan meningkatkan derajat kaum perempuan. Melihat keberhasilan tersebut presiden Soeharto menganjurkan Menter dalam Negeri agar PKK dilaksanakan di daerah-daerah di seluruh Indonesia.¹²

Pada tanggal 27 desember 1972 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu bapak Amir Machmud mengeluarkan surat No. SUS 3/6/12 kepada seluruh Gubernur di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak itu gerakan PKK dilaksanakan diseluruh Indonesia dan tanggal 27 Desember ditetapkan sebagai “hari kesatuan gerak PKK” yang diperingati pada setiap tahun.¹³

Persoalan ketidakadilan gender merupakan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat, Kota Jambi itu sendiri terdapat banyak organisasi wanita baik yang di naungi oleh Pemerintah seperti Dharma Wanita dan PKK. Di naungi pemerintah dengan kata lain, semua proses kegiatannya berada dibawah pengawasan pemerintah. Seperti Dharma Wanita, Dharma Wanita berdiri pada tahun 1974, organisasi istri pegawai negeri sipil ini pada waktu itu didirikan oleh Ibu Tien

¹² Supriyadi “Pemberdayaan Kader PKK melalui kegiatan PKK di desa Banyusidi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm.45

¹³ Muhammad Anshar, *Op.Cit.* hlm.3

Soeharto. Namun pergolakan politik yang terjadi di dalam negeri, dan dengan keinginan untuk menjadi organisasi yang mandiri dan demokratis.¹⁴

Organisasi PKK kota Jambi berdiri pada Tahun 1972, yang diketuai oleh istri bapak Wali Kota Jambi periode 1972-1983 bapak Zainir Haviz, yaitu Ibu Hj. Misolma Zainir. Beliau membina Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga mulai dari tahun 1972 sampai tahun 1983. Fokus utama dari organisasi PKK Kota Jambi ini adalah untuk memberdayakan ekonomi warga yang kurang mampu dengan cara membantu ekonomi kaum perempuan. Keluarga yang sejahtera, berkarakter dan mandiri lahir dari peran seorang perempuan hebat dalam membantu kepala keluarga membangun rumah tangga.

Program kerja PKK berorientasi pada praktis, artinya PKK bergerak pada aksi-aksi nyata memberdayakan dan memihak kaum perempuan. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera yang selalu hidup dalam suasana damai, tertib, tentram, makmur dan sejahtera dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih dari itu, PKK mempunyai andil besar dalam mensukseskan perlombaan antar Provinsi. Pada 10 program PKK membentuk generasi bangsa yang kuat dan sehat, maka untuk itu, program PKK perlu dilaksanakan di Kota Jambi.¹⁵

Program pokok PKK tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa PKK memiliki agenda dan tujuan yang sangat mulia, yaitu ingin mencapai kemajuan dan

¹⁴ Wawancara bersama Ibu Rita Erlina Sekretaris TP-PKK Kota Jambi, pada 02 September 2020.

¹⁵ *Ibid.* hlm.4

kesejahteraan keluarga yang menjadi dambaan setiap keluarga. PKK adalah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai motor atau penggeraknya untuk membangun keluarga sejahtera.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran umum kota Jambi dan akar pertumbuhan Gerakan Perempuan ?
2. Bagaimana Sejarah perkembangan PKK Tahun 1972-2018 ?
3. Bagaimana peranan PKK terhadap kondisi sosial ekonomi Perempuan di Kota Jambi ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Pada skripsi ini penulis akan membahas tentang Organisasi PKK Dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Jambi. Dalam tulisan ini penulis membatasi ruang wilayah, yaitu khusus untuk TP-PKK Kota yang berada di Jl. Jend. Basuki Rahmat, Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi.

Dalam tulisan ini penulis juga membatasi kurun waktu yang akan dibahas yaitu pada masa 1972-2018. Tahun tersebut diambil karena ingin melihat organisasi ini pada tahun 1972 yang merupakan tahun dilaksanakannya organisasi PKK Kota Jambi dan 1972 merupakan masa orde baru dimana negara Republik Indonesia memiliki kontrol yang sangat besar pada warganya terutama perempuan.

Penelitian ini berakhir pada tahun 2018, yang diketuai oleh istri bapak Wali Kota Jambi periode 2013-2018 bapak Syarif Fasha, yaitu Ibu Hj. Yuliana Fasha. Beliau membina Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2018, ditahun tersebut organisasi PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) banyak meraih penghargaan di bidang pemberdayaan perempuan salah satunya yaitu dalam rangkaian Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-XXV yang dipusatkan di Kota Manado, Sulaawesi Utara. Dimana pada tahun ini organisasi PKK kota Jambi meraih penghargaan yaitu Pakarti Utama III PHBS Tingkat Nasional. Kota Jambi berhasil meraih penghargaan tersebut setelah melalui serangkaian penilaian baik secara administrasi maupun peninjauan dan penilaian langsung oleh tim penilai pusat pada bulan maret 2014 yang lalu dan berhasil menyisihkan beberapa kota lainnya di Indonesia.

Penulis juga mengakhiri penelitian ini pada masa reformasi, karena pada masa ini perempuan memiliki keleluasaan dalam memilih kegiatan di masyarakat dan cenderung berpartisipasi dalam beberapa kegiatan sekaligus. Partisipasi pada aneka kegiatan sekaligus, bukan sekedar untuk menyalurkan aspirasi saja, tetapi alat untuk aktualisasi diri bagi perempuan dalam membangun identitas sosial baru yang lebih jamak; bukan sekedar sebagai ibu dan istri saja, tetapi sebagai aktivis sosial dan warga masyarakat. Hal inilah yang menjadi alasan akhir penelitian penulis. Penulis ingin melihat perubahan organisasi PKK dari masa Orde Baru ke masa Reformasi.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.1.4 Tujuan

Agar pelaksanaan penelitian dapat terarah dan berjalan dengan lancar, maka berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis memiliki tujuan yang dikemukakan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui gambaran umum kota Jambi dan akar pertumbuhan Gerakan Perempuan
2. Untuk mengetahui Sejarah perkembangan PKK Tahun 1972-2018
3. Untuk mengetahui Bagaimana peranan PKK terhadap kondisi sosial ekonomi Perempuan di Kota Jambi tahun ?

1.1.5 Manfaat

Manfaat secara akademik :

1. Dapat menambah penulisan historiografi tentang penulisan sejarah gender, khususnya tentang Organisasi PKK Kota Jambi
2. Hasil Penelitian dapat dijadikan rujukan untuk penulisan mengenai Organisasi Perempuan selanjutnya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jambi sebagai sumbangan untuk pengembangan tentang Organisasi Perempuan di Kota Jambi

Manfaat secara praktis :

1. Bagi Organisasi PKK, penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan peran PKK untuk perempuan di Kota Jambi
2. Bagi pembaca diharapkan bisa ikut berpartisipasi dalam Organisasi-Organisasi perempuan di Kota Jambi

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka sangat berguna dalam sebuah penelitian serta sangat membantu dalam proses penulisan karya ilmiah. Adapun literatur-literatur yang terkait dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat diterima dan juga dipertanggung jawabkan secara ilmiah yang dipakai sebagai acuan analisa. Dalam penelitian ini tentang Organisasi PKK Dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Jambi tahun 1972-2018, berdasarkan pengetahuan penulis, ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tulisan ini.

Pertama adalah Buku Julia Suryakusuma tentang *Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Dalam buku ini lebih memfokuskan untuk memaparkan tentang kegiatan perempuan pada masa orde baru, sejarah dan latar belakang pemberdayaan kesejahteraan keluarga, struktur organisasi, dan program-program PKK. Sedangkan dalam penulis membahas mengenai perkembangan PKK di kota Jambi dari tahun 1972-2018.

Kedua adalah buku Cora Vreede-De Stuers tentang *Sejarah Perempuan Indonesia*. Di dalam buku ini memaparkan permulaan kebangkitan gerakan perempuan di Indonesia, terutama pada masa awal abad ke-20. Buku ini membahas

berbagai masalah pergerakan perempuan, ideologi politik sejaman, dan masalah-masalah penting untuk memahami Indonesia. Sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh penulis memaparkan bagaimana perkembangan suatu organisasi perempuan yang muncul pada tahun 1972 di kota Jambi.

Ketiga adalah Skripsi Jam'ah Harahap tentang *Peran Pemberdayaan PKK dalam pemberdayaan wanita di Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan*. Dalam skripsi ini penulis memaparkan tentang pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam hal *life skill* dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam hal pembinaan Rohani. Sedangkan penulis membahas tentang peranan PKK di kota Jambi dan lebih menekankan perkembangan PKK di kota Jambi.

Keempat adalah Skripsi Adistia Restuana Widiyaning tentang *Peranan PKK dan Pengaruhnya terhadap kondisi Sosial Ekonomi Perempuan di Kota Semarang tahun 1972-1998*. Dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan untuk membahas tentang prioritas dan kegiatan PKK untuk menunjukkan pembentukan feminisme yang lebih banyak berkaitan dengan cara hidup kaum elite diperkotaan atau dengan upaya membuat ibu rumah tangga sebagai penjaga rumah tangganya, dari pada dengan kehidupan perempuan Indonesia yang miskin yang berusaha memenuhi kebutuhan keluarga dalam lingkungan perekonomian lokal. Sedangkan penulis memaparkan peranan PKK di kota Jambi dan pemberdayaan perempuan pada tahun 1972-2018

Kelima adalah jurnal Nurhayati tentang *peran pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam upaya peningkatan kesetaraan gender*. Dalam jurnal ini

lebih memfokuskan untuk membahas tentang tingkat pemahaman dan pendidikan, pola perilaku, tingkat pengalaman, dan sosial khususnya di Kecamatan Batu Aji Kota Batam. Sedangkan penulis memfokuskan untuk daerah kota Jambi dimana membahas PKK serta pemberdayaan perempuan di kota Jambi.

1.6 Kerangka Konseptual

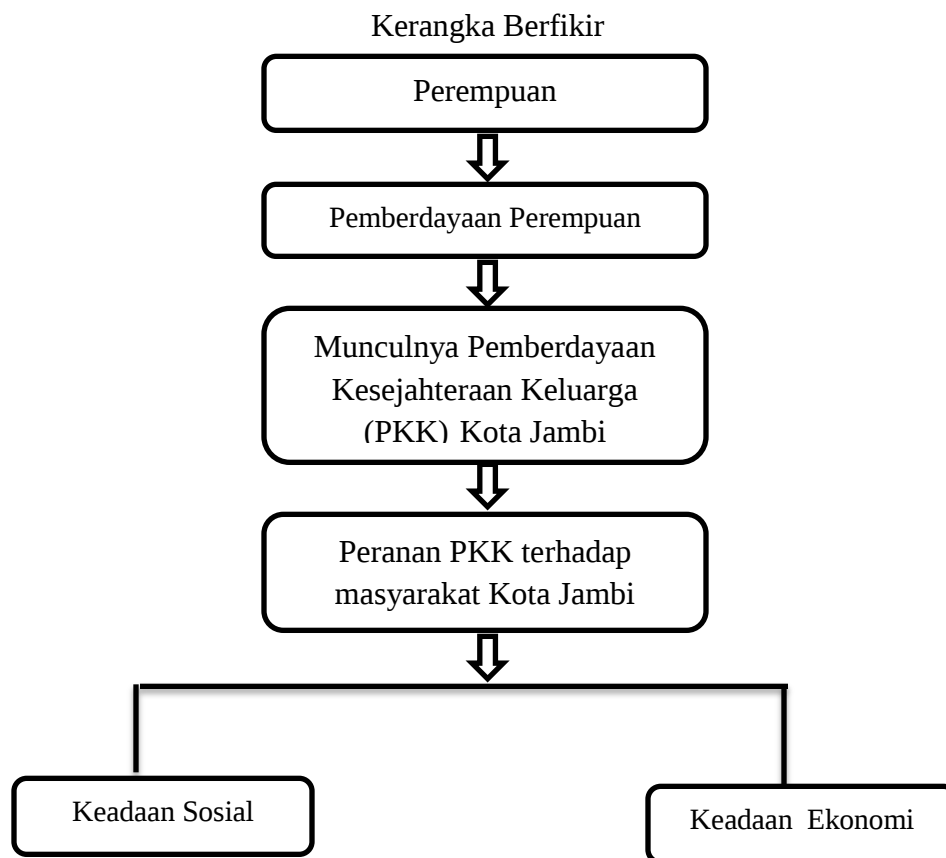
Pendekatan teoritis utama pada gender atau feminisme diantaranya yaitu, Feminisme liberal, teori ini memiliki hirauan utama yaitu hak-hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dengan adanya kebebasan dan kebahagiaan manusia perorangan. Aliran feminisme Liberal berakar dari filsafat liberalism yang memiliki konsep bahwa kebebasan merupakan hak setiap individu sehingga ia harus diberi kebebasan untuk memilih tanpa terkekang oleh pendapat umum dan hukum. Akar teori ini bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas.¹⁶

Teori Feminisme beranjak dari asumsi bahwa gender merupakan konstruksi yang meskipun bermanfaat, tetapi didominasi oleh bias laki-laki dan cenderung opresif terhadap perempuan. Teori feminis berupaya menentang asumsi-asumsi gender yang hidup dalam masyarakat dan mencapai cara yang lebih membebaskan kaum perempuan. Gerakan feminisme telah mempopulerkan analisis gender dalam mengamati berbagai fenomena sosial.

Upaya membebaskan kaum perempuan dari ketidakadilan merupakan perjuangan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih demokratis dan

¹⁶ Abdul Karim, “*Kerangka Studi Feminisme*”, Jurnal Fikrah, Volume. 2, Nomor 1. Juni 2014, hlm.64.

egaliter. Sebab, hak-hak politik, sosial, dan ekonomi perempuan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh kerangka hak asasi manusia, sehingga gerakan perempuan dapat berperan strategis untuk mengutakan gerakan-gerakan perlawanan (gerakan sosial) masyarakat, sebagai agen untuk memperjuangkan hak-hak demokratis, keadilan dan pembebasan rakyat. Dalam menganalisa persoalan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, hendaknya tidak melihat bahwa laki-laki sebagai musuh perempuan, melainkan akar permasalahannya adalah patriarki sebagai salah satu bentuk penindasan perempuan yang dilenggengkan oleh sistem kapitalisme



1.7 Sumber dan Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian cara untuk kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi dasar, pandangan filosofis, ideologis, pertanyaan serta isu-isu yang dihadapi. Metode pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan bagaimana memilih berbagai metode yang ada berdasarkan pada situasi, masalah atau pertanyaan tertentu.¹⁷

Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Metode berarti suatu cara, prosedur atau teknik untuk mencapai sesuatu tujuan secara efektif dan efisien. Metode sejarah dapat diartikan sebagai metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur atau teknik yang sistematis sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah.¹⁸

Lazimnya dalam penelitian sejarah, metode yang akan digunakan dalam studi biografi kali ini akan menempatkan sumber dokumentasi dan kepustakaan sebagai prioritasnya. Akan tetapi, sebelum metode di atas mampu dilaksanakan, maka terdapat dua langkah terpenting yang harus ditempuh terlebih dahulu, yaitu penjajakan lapangan dan eksplorasi data kepustakaan.¹⁹

1. Heuristik (Pengumpulan Data)

Heuristik merupakan langkah awal dalam penelitian sejarah untuk berburu dan mengumpulkan berbagai sumber data yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari survei lapangan.

¹⁷ Supriyadi. *Op.cit.* hlm.22

¹⁸ A. Daliman, "*Metode Penelitian Sejarah*", Yogyakarta: Ombak, 2018, Hlm.24.

¹⁹ Kuntowijoyo, "*Pengantar Ilmu Sejarah.*", Yogyakarta: Bentang. 2001, Hlm, 80.

Pengumpulan data tentang PKK di Kota Jambi ini dilakukan dengan mencari sumber di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Jambi yang berada di Jl. Jend. Basuki Rahmat, Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, sumber yang didapatkan berupa hasil penelitian analisis situasi wanita pedesaan daerah Kota Jambi yang memuat tentang peranan wanita dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat dipedesaan, dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi wanita pedesaan dalam mewujudkan peranannya baik dalam keluarga maupun dalam berbagai aspek pembangunan.

Sumber-sumber lisan akan menjadi terpenting dalam penelitian ini, disebabkan sejarah lisan dapat mencapai pelaku sejarah yang tidak disebutkan dalam dokumen-dokumen resmi. Sumber-sumber sejarah lisan dalam skripsi ini dapat diperoleh dari orang-orang yang terlibat dalam keanggotaan PKK yang *pertama*, Chodijah Sudirman mantan Bendahara PKK Kota Jambi, *Kedua* Karsiah mantan anggota PKK Kota Jambi, *ketiga* Rita Erlina Sekretaris TP-PKK Kota Jambi, *keempat* Sakdiah Soemantadi mantan anggota PKK Kota Jambi, dan terakhir Wahyu Ningsih mantan Wakil Ketua III PKK Kota Jambi

Selain itu terdapat beberapa sumber skunder yang digunakan pada skripsi ini yakni, *pertama* Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Jambi tahun 1999. *Kedua* Pembentukan Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Jambi Masa Bhakti Tahun 2013-2018. *Ketiga* Laporan Kegiatan Program Kerja Pokja I-IV, PKK Kota Jambi. dan beberapa foto-foto kegiatan PKK yang ada di kota Jambi. dalam penelitian ini juga dilakukan dengan

mendatangi perpustakaan-perpustakaan yang ada di Jambi diantaranya yaitu perpustakaan Wilayah, mendapatkan buku Sosiologi Wanita, buku informasi kota jambi dan buku Peran serta Wanita dalam pengembangan Kebudayaan Tradisional di daerah Kota Jambi. Selain itu penulis juga mengumpulkan beberapa jurnal, skripsi dan tesis sebagai referensi tambahan.

2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Kritik merupakan kemampuan menilai sumber-sumber sejarah yang telah dicari (ditemukan). Kritik sumber sejarah meliputi kritik ekstern dan kritik intern.

a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern didalam penelitian ilmu sejarah umumnya menyangkut keaslian atau keautentikan bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber sejarah, seperti prasasti, dokumen, dan naskah. Bentuk kritik ekstern dalam penulisan ini adalah dengan melihat sumber-sumber yang terkait dengan pembahasan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK). Suatu penelitian atau asal usul dari sumber, suatu pemeriksaan atas catatan atau peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan semua informasi. Kritik eksternal harus menegakkan fakta dari kesaksian, bahwa kesaksian itu benar-benar diberikan oleh orang ini atau pada waktu ini kesaksian yang telah diberikan itu telah bertahan tanpa ada perubahan tanpa ada suatu tambahan-tambahan atau penghilangan-penghilangan yang substansial.

b. Kritik Intern

Kebalikan dari kritik eksternal, kritik internal sebagaimana yang disarankan oleh istilahnya menekankan aspek dalam yaitu isi dari sumber kesaksian kritik intern

merupakan penilaian keakuratan atau keautentikan terhadap materi sumber sejarah itu sendiri. Di dalam proses analisis terhadap suatu dokume, sejarawan harus selalu memikirkan unsur-unsur yang relevan di dalam dokumen itu sendiri secara menyeluruh. Unsur dalam dokumen dianggap relevan apabila unsur tersebut paling dekat dengan apa yang telah terjadi, sejauh dapat diketahui berdasarkan suatu penyelidikan kritis terhadap sumber-sumber terbaik yang ada.

3. Interpretasi (Penafsiran)

Interpretasi adalah menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut hingga menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Dari berbagai fakta yang ada kemudian perlu disusun agar mempunyai bentuk dan struktur. Fakta yang ada ditafsirkan sehingga ditemukan struktur logisnya berdasarkan fakta yang ada, untuk menghindari suatu penafsiran yang semena-mena akibat pemikiran yang sempit. Setelah membuat kerangka dan penafsiran, penulis langsung menghubungkan kata yang satu dengan kata yang lain sesuai dengan sumber yang telah ada.

4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi adalah proses penyusunan fakta-fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah di seleksi dalam sebuah bentuk penulisan sejarah. Setelah melakukan penafsiran terhadap data-data yang ada, sejarawan harus sadar bahwa tulisan itu bukan hanya sekedar untuk kepentingan dirinya, tetapi juga untuk dibaca orang lain. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan struktur dan gaya bahasa penulisannya. Sejarawan harus menyadari dan berusaha agar orang lain dapat mengerti pokok-pokok pemikiran yang diajukan.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab I diuraikan tentang pendahuluan yang merupakan (1.1) Latar Belakang, kemudian dilanjutkan dengan (1.2) Rumusan Masalah, (1.3) Ruang Lingkup Penelitian, (1.4) Tujuan dan Manfaat Penelitian, (1.5) Tinjauan Pustaka, (1.6) Sumber dan Metode Penelitian, (1.7) Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Umum dan Pertumbuhan Gerakan Perempuan di Kota Jambi

Dalam Bab II ini akan dijelaskan tentang kondisi umum Kota Jambi dari letak geografis, demografi, dan keadaan ekonomi masyarakat Kota Jambi. Bab ini juga akan menjelaskan tentang perkembangan gerakan Perempuan dari masa Orde baru sampai ke masa Reformasi.

Bab III Sejarah Perkembangan PKK

Pada Bab ini penulis akan membahas tentang sejarah lahirnya PKK dan perkembangan serta kondisi dari sekretariat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Jambi yang akan dimuat dari profil, visi misi, serta dengan SK struktur Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Selain itu, juga akan dibahas apa saja yang terdapat dalam organisasi PKK.

Bab IV Peranan PKK terhadap keadaan sosial ekonomi Perempuan Kota Jambi

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang bagaimana peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dari tahun 1972-2018. Penulis akan memaparkan peranan organisasi ini dari masa Orde Baru ke masa Reformasi, serta bab ini akan

menjelaskan tentang bagaimana pengaruh PKK terhadap kondisi sosial ekonomi Perempuan Kota Jambi.

Bab V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban fokus kajian yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Dan kemudian berisi saran-saran konstruktif yang berkaitan dengan penelitian ini.